



LKJIP TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SAMPANG

2022

BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jamaluddin No. 1-B Telp. (0323) 321538 Fax. 323709
Email : bappelitbangda@sampangkab.go.id Website : bappelitbangda.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Sampang Tahun 2022 dapat tersusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan.

LKjIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang Tahun 2022 merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan sasaran Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang yang diturunkan ke Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan sebagai bagian dari upaya untuk terciptanya *good governance* sebagai tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang baik untuk mewujudkan pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga LKjIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang

Sampang, Januari 2023
Kepala Bappelitbangda Kab. Sampang


Ir. UMI HANIK LAILA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199303 2 004



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup

untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda

Kabupaten Sampang Tahun 2021, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sampang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Bappelitbangda Kabupaten Sampang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud menginformasi pertanggungjawaban Bappelitbangda Kabupaten Sampang secara akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang diamanatkan kepada instansi



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

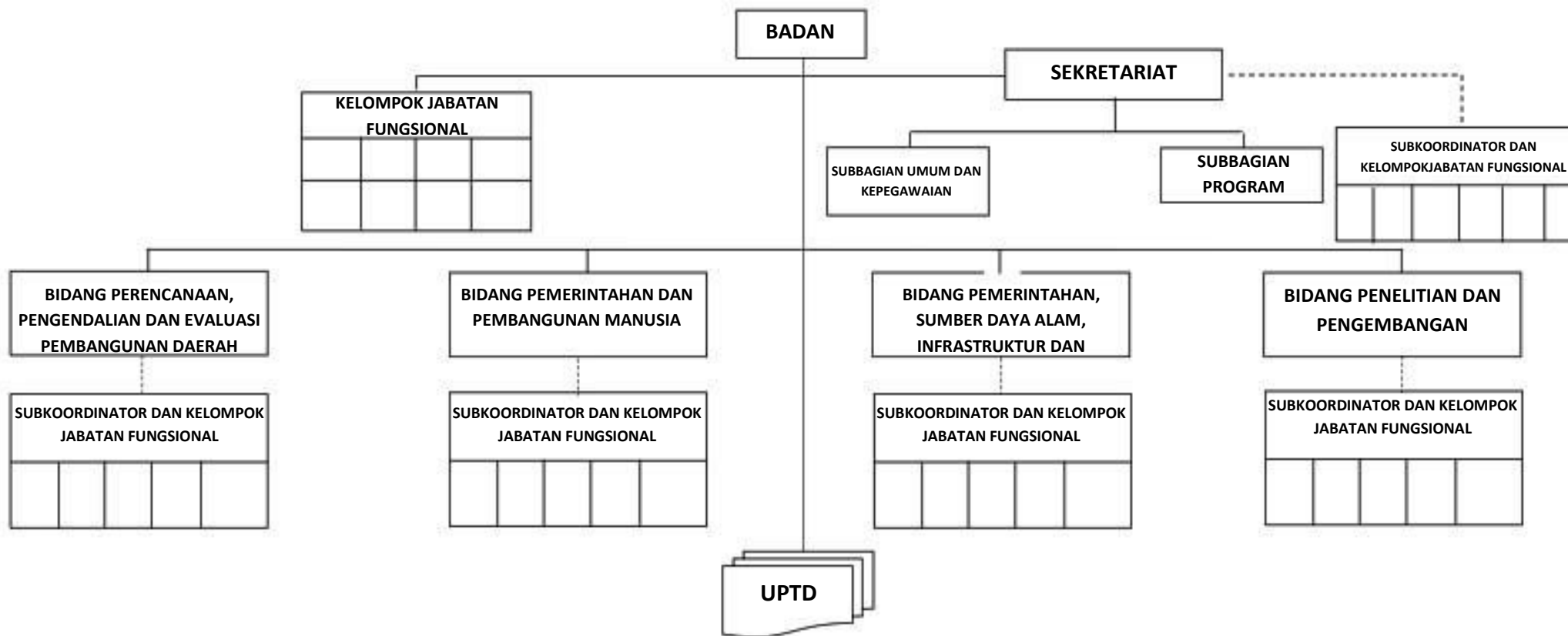
Adapun tujuannya adalah Memberikan informasi mengenai kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dan sebagai bahan evaluasi Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dimasa yang akan datang.

B. STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, Bappelitbangda Kabupaten Sampang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 Sub Bagian, 12 Sub Bidang. dengan bagan sebagai berikut :



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sampang



C. TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Daerah (Bappelitbangda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan; dan
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusun kebijakan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan
 - c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan



f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:

1. Adapun Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Program;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;

g. UPTD Badan; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; dan

4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugas Dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana badan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya aparatur;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*"maintenance"*);
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan; dan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana badan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;



- Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (maintenance); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menghimpun data, menyusun rencana strategis badan dan evaluasinya;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, rencana kerja dan evaluasinya;
- Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- Menyusun laporan capaian program kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;



- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan perencanaan pembangunan daerah;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, swasta dan desa lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Sampang;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Sampang;
- Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Penyusunan bahan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- Merencanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- Penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

6. Unit Pelaksana Teknis

- UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan; dan
- Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

D. ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Hasil analisa isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Bappelitbangda Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
- b. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda;
- c. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

e. CASCADING BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



Tabel 1.1

Cascading Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022

INDIKATOR RPJMD					
VISI	MISI	Tujuan		Sasaran	
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Sampang Hebat Bermartabat	Memperkuat tata kelola pemerintahan Daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Brokrasi (IRB)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Opini BPK Hasil Evaluasi Sakip

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Ket
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar							



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
-	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah		Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA $\geq 80\%$							
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dok. Perencanaan Yang Tersusun	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Yang Disusun	
					Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok - pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD Yang Disusun/Lintas SKPD	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
					Persentase program/kegiatan Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Renstra Perangkat Daerah			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Yang Disusun	
					Persentase program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKPD			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	
								Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan DBHCT Yang Disusun	
									Jumlah Perubahan Renja n-1 Yang Ditetapkan dengan SK Bupati	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
									Jumlah Perubahan RKPDP Tahun n-1 Yang Ditetapkan dengan Perbup	
									Jumlah Renja Tahun n Yang Ditetapkan dengan Perbup	
									Jumlah Renstra Yang Ditetapkan dengan Perbup	
									Jumlah RKPDP Tahun n Yang Ditetapkan dengann Perbup	
									Jumlah RPJMD Yang Ditetapkan dengan Perda	
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data SKPD Kab. Sampang	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	
								Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Lapr Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	
								Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Berkualitas lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang difasilitasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Disusun	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi/Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Yang Disusun	
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Disusun	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi/Asistensi Dolumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Disusun	
					Persentase dokumen rencana Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang difasilitasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur	

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Inovasi dan Teknologi yang di implemtasikan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
					Persentase hasil litbang yang di implementasikan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			Indeks Inovasi Daerah			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang diterapkan	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang diterapkan Jumlah Sosialisasi dan Fasilitas Kelitbangan	

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Fasilitasi Kelitbangan	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel IK : (1) Nilai Perencanaan Kinerja Daerah (2) Nilai Pengukuran Kinerja Daerah

Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas
IK : 1) Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar
2) Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %

Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah
IK : (1) Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah
(2) Indeks Inovasi Daerah

Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
IK : Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan

Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Dengan Isu Strategis
IK : Persentase Prioritas Pembangunan yang sesuai dengan Isu Strategis (Dok. Cascading)

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi secara berkala
IK : Persentase OPD dengan hasil capaian kinerja baik

Implementasi Penelitian/Kajian
IK : Persentase Penelitian/Kajian Yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Pengembangan Inovasi
IK : Persentase tingkat kematangan inovasi tinggi

Terwujudnya keselarasan perencanaan Daerah, Provinsi, dan Pusat
IK: (1) Persentase keselarasan prioritas Daerah dengan Provinsi
(2) Persentase keselarasan prioritas Daerah dengan Pusat

Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan Daerah
IK: Persentase kinerja pembangunan yang selaras antar dokumen perencanaan Daerah

Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan PD
IK: Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah yang selaras

Terwujudnya perencanaan partisipatif
IK : Persentase Usulan masyarakat yang diakomodir

Tersedianya data perencanaan pembangunan yang berkualitas
IK : Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang tersedia

Perumusan Kebijakan Yang Sesuai Isu Strategis
IK : Persentase Perumusan Kebijakan Yang Sesuai Isu Strategis (Dok Pokin Kabupaten)

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
IK : Persentase OPD yang pelaksanaan pembangunan daerahnya terkendali

Penyusunan Penelitian/Kajian sesuai prioritas Daerah
IK: Persentase Usulan Penelitian/Kajian yang ditindaklanjuti

Implementasi Inovasi
IK : Persentase inovasi yang diimplementasikan

KISS perencanaan Pusat-Provinsi-Daerah
IK : (1) Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang selaras Daerah-Provinsi
(2) Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang selaras Daerah-Pusat

Konsistensi program dalam RPJMD-RKPD
IK : Persentase program dalam RPJMD yang diakomodir dalam RKPD

KISS perencanaan Daerah-Perangkat Daerah
IK : (1) Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan yang selaras RPJMD-Renstra
(2) Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan yang selaras RKPD-Renja

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
IK : Berita Acara Musrembang

Meningkatnya Fungsi Forum Data
IK: Laporan Hasil Koordinasi Forum data

Perumusan Isu Strategis
IK: Jumlah Isu Strategis

Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
IK: Jumlah pelaporan evaluasi yang disusun

Penjaringan Kebutuhan Penelitian/Kajian
IK: Jumlah kajian usulan OPD

Uji Coba Rancangan Bangun Inovasi
IK : Dokumen Rancang Bangun

Konsultasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
IK : Berita Acara Konsultasi Publik

Meningkatnya Fungsi Simpul Jaringan
IK: Persentase simpul jaringan yang aktif

Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah
IK: Jumlah koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan

Forum Diskusi Usulan Penelitian/Kajian
IK : Laporan Hasil Forum

Sosialisasi Pengembangan Inovasi
IK : Lapr Sosialisasi Inovasi

Pengumpulan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan
IK : Jumlah Data/informasi Yang Dianalisis

Koordinasi dengan OPD dan Stakeholder Terkait
IK : Lapr. Hasil Koordinasi dengan OPD dan Stakeholder Terkait
IK : Lapr. Hasil Koordinasi

Sosialisasi dan Pembinaan Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
IK : Jumlah Peserta dan Sosialisasi/Sosialisasi dan Pembinaan Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
IK : Jumlah Peserta dan Sosialisasi

Identifikasi kebutuhan penelitian/kajian sesuai prioritas
IK: Persentase realisasi kebutuhan penelitian/kajian



f. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
2.	Belum tercapainya target pada indikator kinerja	Dari 36 indikator sasaran yang tertuang pada Perubahan	Faktor Internal:



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	"Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2020 terdapat 7 indikator yang nilai capaiannya $\geq 80\%$, sehingga nilai realisasi indikator "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " sebesar 80,55 persen dari target 95,00 persen. Sedangkan capaiannya memiliki nilai 84,79 persen.	Kurangnya koordinasi dan pengendalian di lingkup bidang Bappelitbangda dalam rangka mengawal capaian indikator sasaran RPJMD secara periodik hal ini bertujuan supaya Perangkat Daerah mampu mengevaluasi kinerjanya sehingga mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Faktor Esternal: Terdapat kendala teknis pada Perangkat Daerah masing-masing sehingga Perangkat Daerah pengampu indikator sasaran RPJMD tersebut tidak mampu mencapai target
3.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sudah tercapai 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaannya Kapasitas personel penyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan
4.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala	Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir	Faktor Internal: Keterbatasan SDM Bidang Litbang Faktor Eksternal: Masih terdapat usulan kajian



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			dari Perangkat Daerah yang belum mengacu pada prioritas pembangunan
5	Kurang optimalnya pelaksanaan inovasi pada OPD	Kurang responnya PD terhadap pelaporan inovasi daerahnya	Faktor Internal: SDM pelaksana inovasi kurang serius terhadap pelaksanaan inovasi OPD masing--masing dan masih bekerja berdasarkan budaya kerja lama Faktor Eksternal: Marketing branding tidak ditindak lanjuti

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019-2024

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
- Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda;
- Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

Beberapa isu strategis tersebut dapat ditelaah lebih dalam dan dikaitkan pada isu pengarusutamaan gender. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya. Dalam analisa gender ini juga dilakukan proses identifikasi masalah terutama mengenai isu gender yaitu suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi



sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.

g. PETA PROSES BISNIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Jika proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Bappelitbangda Kabupaten Sampang.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Kabupaten Sampang :



PERATURAN BUPATI SAMPANG NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN

TUGAS

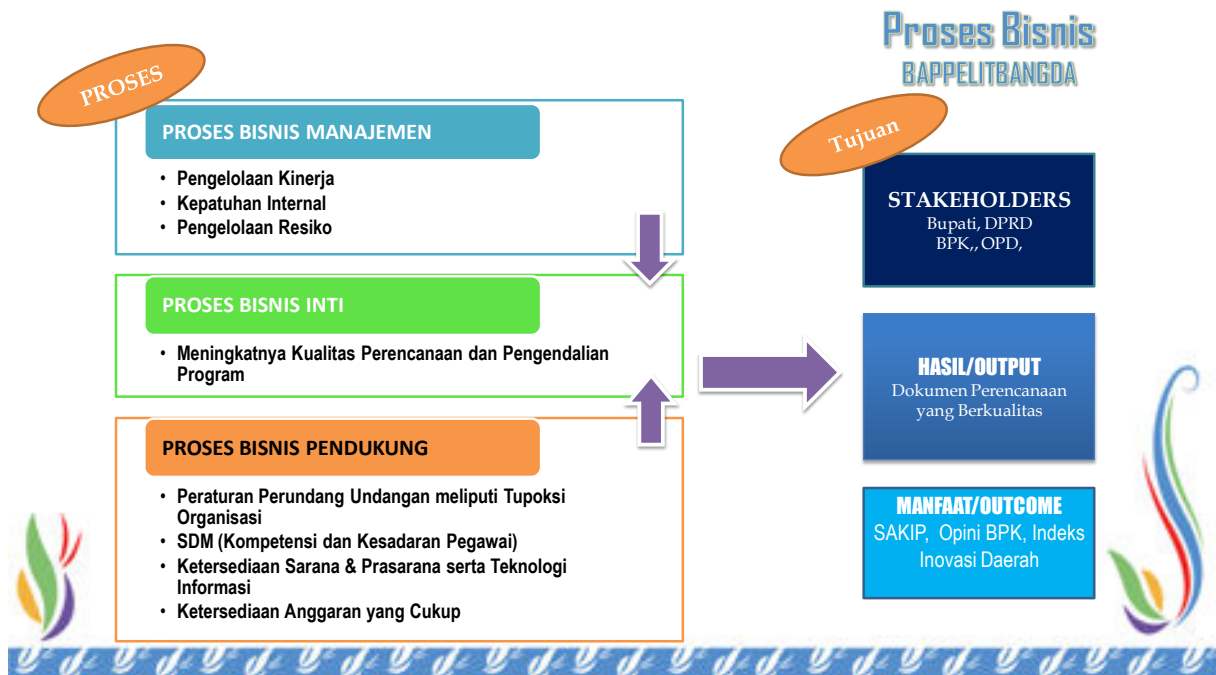
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN SAMPANG**

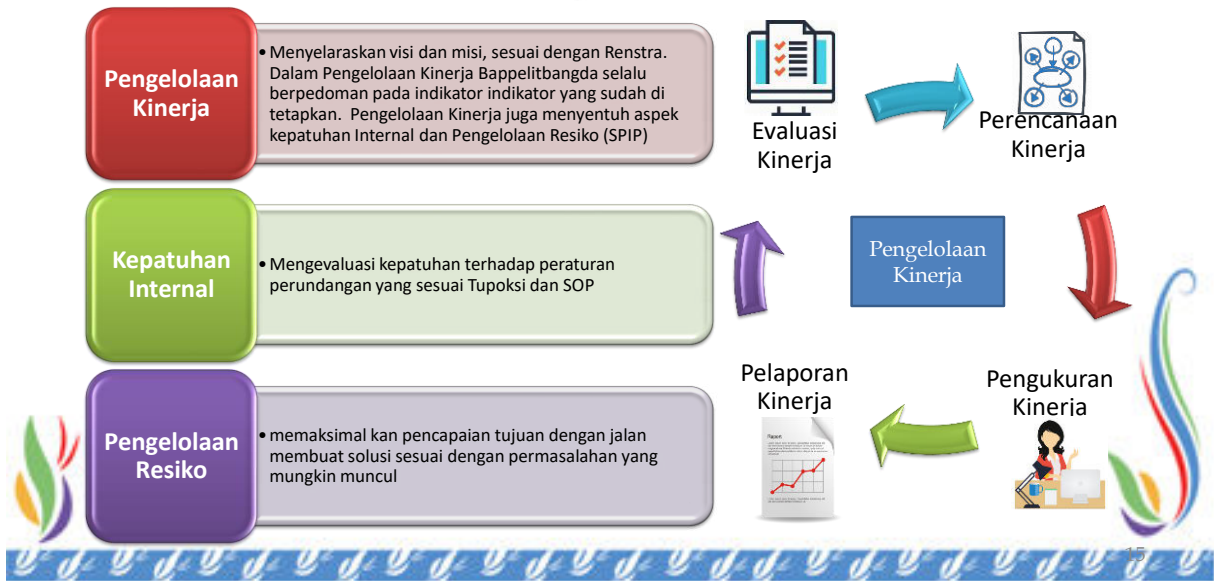
FUNGSI

- penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

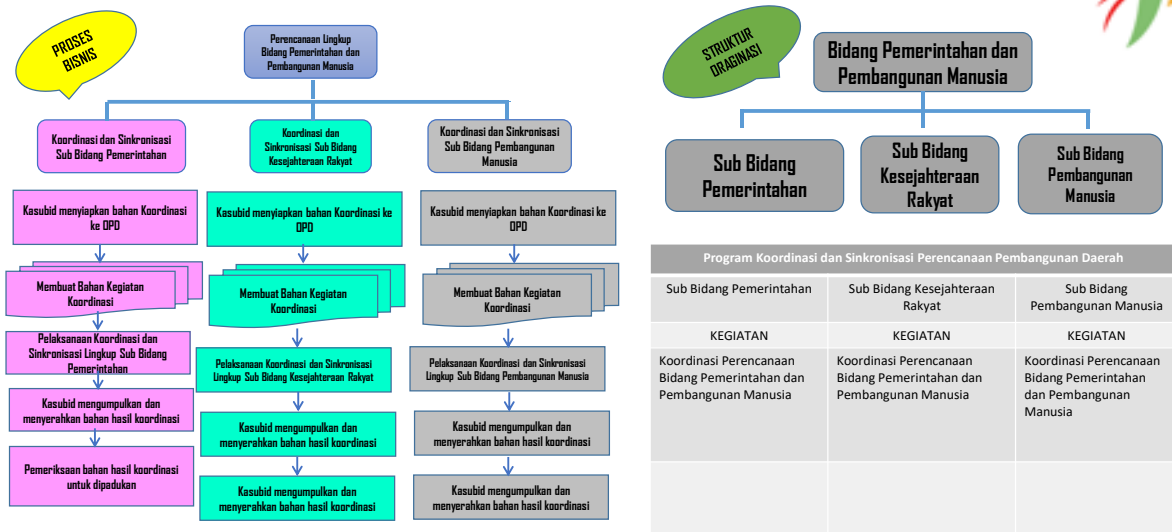




Proses Bisnis Manajemen

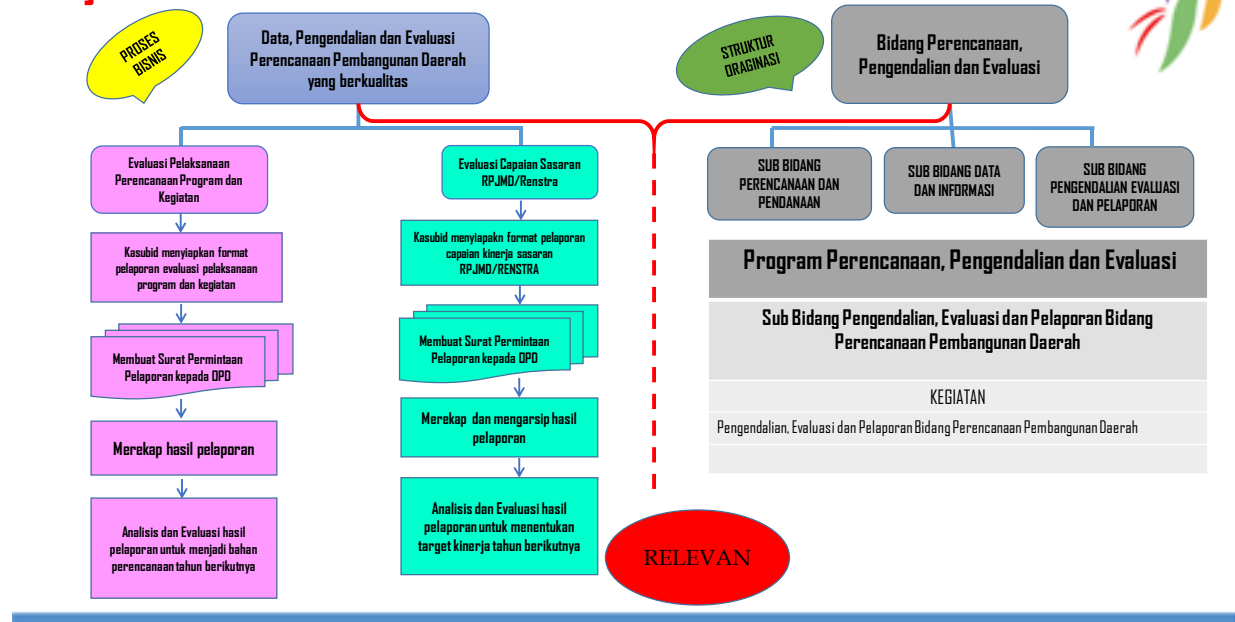


Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi





Lanjutan...



h. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 nomor : 065/373.21/434.100/2022 tanggal 12 September 2022, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Perumusan tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria namun perlu dipastikan konsistensi penulisan tujuan, indicator tujuan, sasaran dan indicator sasaran antara Dok. Renstra, Renja IKU, Cascading, PK, Kurja dan LKjIP.

Indikator kinerja tujuan dan sasaran telah menggambarkan kondisi tujuan yang ingin dicapai, namun tidak baku dan sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis.

B. Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran

Pengukuran kinerja telah dikembangkan menggunakan teknologi informasi



Implementasi Kinerja

Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Belum ada bukti pendukung (eviden) hasil pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran

C. Pelaporan Kinerja

- Informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai
- Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
- Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Internal

Pelaksanaan evaluasi internal tidak hanya sebatas evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, namun hendaknya mampu mendeteksi anggaran-anggaran yang kurang mampu mendorong kegiatan yang ingin dicapai untuk dilakukan refofusing guna mencapai tujuan yang ingin dicapai



BAB II

Perencanaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Sampang, Bappelitbangda Kabupaten Sampang yang mendukung pencapaian misi 4 Bupati Sampang memiliki tujuan “Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra 2019-2024)

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	Realisasi/Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022 (Target)	2023 (Target)	2024 (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 1:									
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	74,5	77,13	78,63	78,97	79	80	80	80
		Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	63,84	67,16	68,56	69	70	71	72	72
	Sasaran 1:									
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	100	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			80	81	82	83	83
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	n/a	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			80	81	82	83	83
	Sasaran 2:									
2	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	n/a	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			16,67	12,50	8,33	8,33	8,33
		Indeks Inovasi Daerah	0	860	2454	65*	70*	75*	80*	80*



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappelitangda, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, yaitu :

- a. Nilai Perencanaan Kinerja Daerah
- b. Nilai Pengukuran Kinerja Daerah
- c. Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar
 1. Berorientasi pada Hasil
 2. Target Jelas
 3. Indikator SMART
 4. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra
- d. Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %
- e. Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah
- f. Indeks Inovasi Daerah

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, sehingga penjabaran atas sasaran Perubahan RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Bappelitbangda dalam kurun waktu 2019-2024.

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategic dimana IKU yang ditetapkan oleh Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Nilai Perencanaan Kinerja Daerah;
2. Nilai Pengukuran Kinerja Daerah; dan
3. Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar
4. Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA $\geq 80\%$.
5. Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah
6. Indeks Inovasi Daerah



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami perubahan berdasarkan penajaman hasil evaluasi SAKIP Bappelitbangda Tahun 2021 dan adanya penyesuaian pada Pohon Kinerja (POKIN) Tahun 2022 .

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Penilaian SAKIP	LHE SAKIP	Bappelitbangda
		Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	Komponen Pengukuran Kinerja Dalam Penilaian SAKIP	LHE SAKIP	Bappelitbangda
2	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang telah memenuhi standar sesuai kertas kerja Bappelitbangda		Bappelitbangda
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA $\geq 80\%$	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran PD yang telah tercapai $\geq 80\%$		Bappelitbangda
3	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan Jumlah OPD Yang Mengusulkan Kajian Penelitian		Bappelitbangda
		Indeks Inovasi Daerah	Himpunan Inovasi Daerah yang telah DILAPORKAN kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .		Bappelitbangda

Sumber : P-Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019-2024

Pada Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang berkomitmen untuk melaksanakan kinerja sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategis dan RKT, dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target di tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 2.3
Rencana Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022





NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	1 Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	79,00%
		2 Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	70,00%
2	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	1 Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	81,00%
		2 Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	81,00%
3	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	1 Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	12,50%
		2 Indeks Inovasi Daerah	70*

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja. Adapun rencana kinerja Bappelitbangda ditetapkan dalam Penetapan Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran belanja langsung dari APBD sebesar Rp 7.438.825.754,00 yang digunakan untuk melaksanakan 17 kegiatan, 56 sub kegiatan yang terangkum dalam 4 program sebagai berikut:





BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Program		Anggaran (Rp.)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.578.763.187,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Ealuasi Pembangunan Daerah	1.135.532.056,00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.246.700.492,00
	Program Penelitian dan Pengembangan	477.830.019,00
TOTAL		7.438.825.754,00

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 (PAK) BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG																		
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target															
1	2	3	4															
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja vana Akuntabel	1 Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	79,00%															
		2 Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	70,00%															
2	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang	1 Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	81,00%															
		2 Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	81,00%															
3	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	1 Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	12,50%															
		2 Indeks Inovasi Daerah □	70*															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Program</th> <th>Anggaran</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</td> <td>Rp 4.578.763.187,00</td> <td>APBD</td> </tr> <tr> <td>2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</td> <td>Rp 1.135.532.056,00</td> <td>APBD</td> </tr> <tr> <td>3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</td> <td>Rp 1.246.700.492,00</td> <td>APBD</td> </tr> <tr> <td>4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</td> <td>Rp 477.830.019,00</td> <td>APBD</td> </tr> </tbody> </table>				Program	Anggaran	Keterangan	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.578.763.187,00	APBD	2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.135.532.056,00	APBD	3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.246.700.492,00	APBD	4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 477.830.019,00	APBD
Program	Anggaran	Keterangan																
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.578.763.187,00	APBD																
2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.135.532.056,00	APBD																
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.246.700.492,00	APBD																
4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 477.830.019,00	APBD																
<p align="center">Bupati Sampang</p>  <p align="center">H. SLAMET JUNAIDI</p>		<p align="center">Sampang, 24 Oktober 2022 Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang</p>  <p align="center">Ir. UMI HANIK LAILA, MM Pembina Tk. I NIP. 19661202 199303 2 004</p>																



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggung-jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Bappelitbangda Kabupaten Sampang pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 85% dari target.

Akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten Sampang merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Bappelitbangda Kabupaten Sampang kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Bappelitbangda sebagai penjabaran dari strategi Bappelitbangda yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	>100%	Lebih dari Seratus Persen	Sangat Baik
2.	75% s.d 100%	Tujuh puluh persen sampai seratus persen	Baik
3.	55% s.d <75%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang

**A. ANALISA CAPAIAN KINERJA**

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, maka perlu diketahui tingkat capaian sasaran yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja kegiatan, menggambarkan tingkat capaian seluruh indikator kinerja kegiatan termasuk indikator pemicu (indikator input dan output).
2. Tingkat capaian kinerja kegiatan dan program, menggambarkan tingkat capaian indikator pemicu/pendukung (indikator input dan output).
3. Tingkat capaian kinerja sasaran, menggambarkan capaian kinerja masing-masing sasaran yang ditentukan berdasarkan indikator berupa hasil yang dicapai (indikator outcome).

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran yang ditentukan oleh indikator hasil (indikator outcome), indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh input dan output setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang

Sasaran				Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	Nilai	78,97	79	80,5	101,90	Sangat Tinggi
		b	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	Nilai	69	70	70	100	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	a	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	%	100	81	84,62	104,47	Sangat Tinggi
		b	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	%	93,96	81	84,62	104,47	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	a	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	%	12,50	12,50	8,33	66,67	Sangat Tinggi
		b	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65*	70*	66,35*	94,79	Sangat Tinggi

Dari hasil penilaian capaian 3 sasaran diukur melalui keberhasilan pencapaian 6 (enam) indikator kinerja.

**Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator (1) Nilai Perencanaan Kinerja Daerah**

Sasaran				Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja		Satuan		Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	%	78,97	79	80,5	101,90	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meskipun telah dilakukan penyempurnaan pada perenanaan kinerja tingkat PD, namun masih ditemukan perumusan sasaran strategis yang belum berorientasi outcome dan indikator kinerja yang ditetapkan tidak relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan penapaian kinerja yang ditetapkan pada sebagian PD.
- b. Pohon kinerja yang disusun sebagian keil PD belum sepenuhnya berdasarkan kerangka berpikir /logical ramework dan hubungan antara level kinerja belum disusun dengan mempertimbangkan *critical succes factor* (CSF).

Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator (2) Nilai Pengukuran Kinerja Daerah

Sasaran				Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja		Satuan		Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	%	69	70	70	100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja seara elektronik. Namun pemanfaatan aplikasi ini belum maksimal, karena sebagian kecil PD yang memanfaatkan aplikasi ini dengan mengisi data pengukuran kinerjanya.
- b. Pemantauan yang dilakukan masih berfokus pada penyerapan anggaran belum mengarah ke pencapaian kinerja. Pemantauan belum dilakukan secara berjenjang sehingga realisasi pencapaian kinerja tidak terkendali dengan baik.



Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran (2) Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas (1) Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar

Sasaran			Realisasi	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Kategori
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Target	Realisasi		
1 Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	1 Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	%	100	81	84,62	104,47	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sebanyak 33 PD dari 39 PD atau 84,62%. Realisasi tersebut mencapai target seluruh PD telah menyelesaikan penyusunan dokumen Renstra yang mengacu pada dokumen RPJMD. Kertas kerja dalam rangka pengukuran tersebut dapat dilihat sebagaimana terlampir dalam bentuk **soft copy**.

Berikut kertas kerja asistensi RENJA-RENSTRA 2022 yang dikerjakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang :



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

ASISTENSI DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SAMPANG TAHUN

NO.	URAIAN	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	SKOR PENILAIAN (SKALA 1-100)	TOTAL	REKOMENDASI KONSOLIDATOR
I	BAB I. PENDAHULUAN	Apakah Landasan Hukum yang dituangkan sudah relevan dan mengacu pada Ranperbup Renja Perangkat Daerah	5%	100	5	
II	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	Apakah hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah telah tersaji dengan baik dan benar?	15%	100	15	
		Apakah Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah telah tersaji dengan baik?	5%	100	5	
		Apakah Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah telah disajikan dengan baik?	5%	100	5	
		Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Bagi Perangkat Daerah yang memiliki usulan hasil Musrenbang dan Pokir)	5%	100	5	
III	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Keterkaitan Bab 8 RPJMD dengan Renja PD)	5%	100	5	
		Apakah tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	15%	100	15	
		Apakah Target-target Tujuan dan Sasaran pada tahun rencana telah berdasarkan hasil telaahan dan evaluasi pada bab sebelumnya	10%	100	10	
		Apakah Program pada Renja telah selaras dengan RPJMD	15%	100	15	
IV	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Apakah Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan RKPD (Matrik Renja - Matrik RKPD)	10%	100	10	
		Apakah inovasi Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah telah dituangkan	5%	100	5	
V	DILUAR BAB	Apakah sitematika Renja Perangkat Daerah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku?	5%	100	5	
			100%		100	Sangat Baik



HASIL PENILAIAN

INTERVAL PENILAIAN RENJA PD	KRITERIA PENILAIAN
$91 \leq 100$	Sangat Baik
$76 \leq 90$	Baik
$66 \leq 75$	Cukup
$51 \leq 65$	Kurang
≤ 50	Buruk

**Tabel 3.2.4 Capaian Kinerja Sasaran (2) Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas (2) Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah > 80**

Sasaran				Realisasi Tahun 2020	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	1	Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah > 80%	%	93,96	81	84,62	104,47	Sangat Tinggi

Capaian Indikator kinerja sasaran Renstra Perangkat Daerah \geq 80% sebanyak 77 indikator dari 91 Indikator sasaran dengan target kinerja 81% pada tahun 2022 mencapai target dengan realisasi 104,47%. Dari 91 indikator tersebut terdapat beberapa indikator yang belum realease data kementrian, seperti yang terjadi pada Dinas pendidikan, dimana indikator yang digunakan belum realase dari Kemendiknas.

Berikut kertas kerja evaluasi RENJA-RENSTRA 2022 yang dikerjakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang ;

**KERTAS KERJA EVALUASI RENJA-RENSTRA 2022
Bappelitbangda Kab. Sampang**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	NILAI	BOBOT	Kategori
1	Program dalam Renja konsisten dan selaras dengan RENSTRA dan RPJMD	100	10%	Sangat Baik
2	Kegiatan dalam Renja konsisten dan selaras dengan RENSTRA		10%	Belum Diisi
3	Indikator kinerja program (output) telah memenuhi kriteria SMART		20%	Belum Diisi
4	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	Y/T	15%	Belum Diisi



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

5	Anggaran kegiatan dalam dokumen Renja sudah dirasionalkan dengan output yang akan dicapai		15%	Belum Diisi
6	Indikator kinerja kegiatan (output) telah memenuhi kriteria SMART		20%	Belum Diisi
7	Indikator kinerja Program dan Kegiatan dalam dokumen Renja konsisten dengan dokumen Renstra		10%	Belum Diisi
NILAI KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN OPD				Belum Diisi

**Tabel 3.2.5 Capaian Kinerja Sasaran (3) Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah (1) Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah**

Sasaran				Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja		Satuan		Target	Realisasi			
1	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	a	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	%	12,5	12,5	8,33	66,67	Sangat Tinggi

Kajian yang disusun selama tahun 2022 sebanyak 2 kajian yaitu:

- Penyusunan Strategi Peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Kampung Belanda

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan. Hasil kajian tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya.

Tabel 3.2.6 Capaian Kinerja Sasaran (3) Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah (2) Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah

Sasaran				Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja		Satuan		Target	Realisasi			
1	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	a	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65*	70*	66,35*	94,79	Sangat Tinggi

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek, yang merupakan salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”.

Bappelitbangda Kabupaten Sampang menyelenggarakan asistensi pembinaan Indeks inovasi daerah. Asistensi ini membahas kebijakan inovasi daerah yang mendorong ekosistem inovasi dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, sebagai narasumber yakni Isman, AP, Fungsional Analis Kebijakan dan Arzad Sectio, S.IP, MPA, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pemaparannya, Isman membahas pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintah daerah agar melakukan inovasi. Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

Hasil indeks inovasi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022, yang mana berdasarkan pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2022 sebesar 66,25*, dimana hasil tersebut dipengaruhi oleh Kualitas dan kuantitas inovasi yg dikirimkan, jumlah banyaknya inovasi yg dikirim. Pemerintah Kabupaten Sampang Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak inovasi yang perlu ditingkatkan dalam hal kematangan inovasi dengan mengoptimalkan variabel yang ada.



Kendala :

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala. Yaitu Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal. Selain itu juga dari Faktor Internal : Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan dan Faktor Eksternalnya : Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala. Diantaranya Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir. Selain itu juga dari Faktor Internal : Keterbatasan SDM Bidang Litbang dan dari Faktor Eksternal : Masih terdapat usulan kajian dari Perangkat Daerah yang belum mengacu pada prioritas pembangunan.

Upaya Mengatasi :

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam peningkatan ini, diantaranya meliputi :

1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal.
2. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
4. Perkembangan teknologi dan informasi.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2021), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				
		2022	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	79%	74,5	77,13	78,63	78,97	80,50
	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	70%	63,84	67,16	68,56	69	70,00
Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	81	100	100	100	80	84,62
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	81	100	100	100	80	84,62
Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	12,50%	n/a	100	100	16,67	8,33
	Indeks Inovasi Daerah	70*	0	860	2454	65*	66,35*

1. Nilai Perencanaan Kinerja Daerah

Perencanaan Kinerja Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Sub Komponen Keberadaan

Perangkat Daerah telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang meliputi Renstra dan Renja, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yang meliputi Rencana Aksi Bulanan atau Triwulan dan dokumen PK dan SKP semua pegawai, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja



b. Sub Komponen Kualitas

Dokumen Renstra Perangkat Daerah telah memuat indikator keberhasilan yang memenuhi kriteria IK yang baik/SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound) sesuai jenjang. Semua indikator di level RPJMD (indikator Program) sudah berorientasi outcome/hasil. Sasaran yang berorientasi hasil, target kinerja yang ditetapkan cukup baik, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran. Dokumen Renstra sebagian besar selaras dengan dokumen RPJMD. Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

c. Sub Komponen Implementasi

Perangkat Daerah telah menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya, dokumen Renstra sebagian besar selaras dengan dokumen RPJMD dan telah dilakukan evaluasi terhadap dokumen Perencanaan kinerja tahun 2019-2024 dan dilakukan perbaikan pada periode perencanaan 2019-2024

2. Nilai Pengukuran Kinerja Daerah

Pengukuran Kinerja Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja, serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 24,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00. Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

- a. Sub Komponen Keberadaan
- b. Sub Komponen Kualitas
- c. Sub Komponen Implementasi

3. Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar

Konsistensi perencanaan pembangunan menjadi aspek penting agar target pembangunan jangka menengah mampu tercapai. Melalui keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan pembangunan di



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

setiap tahun berjalan, pembangunan daerah akan lebih terarah sehingga mampu menjadi solusi atas permasalahan dan isu strategis daerah.

Berdasarkan formulasi perhitungannya, Indikator tersebut dihitung berdasarkan Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik / Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah x 100%

Kriteria Baik:

1. Berorientasi pada Hasil
2. Indikator SMART-C (specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve)
3. Target Jelas
4. Konsistensi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

program yang terdapat pada dokumen RKPD tahun berjalan dengan jumlah program yang terdapat pada RPJMD 2019-2024. Target indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang.

4. Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %

Pembangunan daerah diukur melalui tingkat ketercapaian indikator yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Melalui dokumen perencanaan pembangunan, target pembangunan jangka menengah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan ke dalam target tahunan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Hasil capaian program pada dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya akan diukur dan dievaluasi guna memastikan target pada akhir masa periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat tercapai.

Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mewakili peran dalam lingkup evaluasi. Definisi operasional indikator kinerja utama ini adalah indikator kinerja program yang memiliki tingkat capaian kinerja minimal 76%. Hal ini didasarkan pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017, bahwa kriteria tingkat capaian kinerja dengan kategori 'tinggi' adalah interval 76% sampai dengan 90%. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja dengan interval 91% - 100% masuk pada kategori "sangat tinggi". Pengukuran capaian indikator kinerja utama ini dilaksanakan setelah evaluasi terhadap hasil Renja PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sampai dengan triwulan IV atau akhir periode pelaksanaan Renja PD dengan format evaluasi seperti yang telah diatur.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan formulasi perhitungannya, Indikator tersebut dihitung berdasarkan Jumlah Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah tercapai $\geq 80\%$ / Jumlah Indikator Renstra Perangkat Daerah $\times 100\%$.

5. Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah

Hasil penelitian menjadi salah satu bagian penting dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan efektif. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah lembaga think tank milik pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk penelitian dan pengembangan. Salah satu dari misi lembaga ini adalah pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penelitian/kajian didasarkan pada permintaan dan disesuaikan dengan kebutuhan data Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Hasil penelitian agar mudah menjadi masukan atau rekomendasi dalam kebijakan perlu mendapat dukungan dari pembuat dan pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian/kajian ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu :

- 1) Menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan (KAK)
- 2) Koordinasi dengan pimpinan terkait judul penelitian
- 3) Melaksanakan kegiatan administrasi (pemberitahuan kegiatan, undangan, pengajuan proposal dan negosiasi)
- 4) Melaksanakan kesepakatan dengan Penyedia Jasa sekaligus pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan
- 5) Mengadakan perjanjian kerja sama terkait pelaksanaan kegiatan
- 6) Pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia setelah diterbitkannya surat perintah kerja
- 7) Penyusunan laporan awal kegiatan
- 8) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pekerjaan
- 9) Penerimaan draft laporan akhir dari penyedia jasa
- 10) Penerimaan laporan akhir kegiatan dari penyedia jasa
- 11) Penggandaan dokumen hasil kegiatan 1
- 2) Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati

Indikator Kinerja Utama Persentase Hasil Penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pemerintah Daerah memiliki definisi operasional hasil/rekomendasi dari penelitian telah disampaikan kepada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan maupun Perangkat Daerah lain yang terkait untuk selanjutnya ditindaklanjuti berupa kebijakan ataupun kegiatan.

Kajian yang disusun selama tahun 2019 sebanyak 4 kajian yaitu:



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- 1) Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah
- 2) Roadmap SIDA
- 3) Kajian Revitalisasi Manajemen Pasar Daerah
- 4) Kajian Indeks Toleransi

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan.

Kajian yang disusun selama tahun 2020 sebanyak 4 kajian yaitu:

- Kajian Pengembangan Kawasan Pelabuhan Trunjooyo (Dinas Perhubungan, diajukan dana ke pusat untuk memenuhi sarpras pelabuhan dgn berfungsinya kapal penumpang ke Probolinggo)
- FS Rumah Kemasan (Diskopindag, THN 2022 pembangunan rumah kemasan dr DAK)
- Kajian Pengembangan Usaha BUMD (bagian perekonomian, rencana PT. GSM untuk pengembangan usaha)

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan. Hasil kajian tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya.

Kajian yang disusun selama tahun 2021 sebanyak 2 kajian yaitu:

- Grand Design Sistem Pertanian Terpadu (Disperta)
- Kajian Pengembangan Bumdes (DPMD)

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan. Hasil kajian tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya.

6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
-1	-2	-3	-4	-5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	80	80,5	100,63%
	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	72	70	97,22%
Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	83	84,62	101,95%
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	83	84,62	101,95%
Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	8,33	8,33	100,04%
	Indeks Inovasi Daerah	80*	66,35*	82,94%

Dari tabel 3.4 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (benchmark kinerja), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	Realisasi Nasional	KET
-1	-2	-4	-4	-5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	80,5		Tidak tersedia data
	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	70		Tidak tersedia data
Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	84,62		Tidak tersedia data
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	84,62		
Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	8,33		Tidak tersedia data
	Indeks Inovasi Daerah	66,35*		

Perbandingan realisasi kinerja Bappelitbangda dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2022, total anggaran belanja tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.523.120.653,00. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 7.523.120.653,00. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Bappelitbangda Kabupaten Sampang tahun 2022 berdasarkan kelompok belanja

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi APBD Bappelitbangda Kabupaten Sampang tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4(3:2)
BELANJA LANGSUNG	7.523.120.653,00	6.857.785.956,00	91,16
JUMLAH	7.523.120.653,00	6.857.785.956,00	91,16

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan dalam angka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda.

Tabel 3.7
Penyerapan anggaran per sasaran strategis sesuai APBD 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Alokasi Biaya		
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah		6.983.419.432,00	6.340.893.402,00	90,80
	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah				
Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar				
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.638.824.470,00	4.347.366.560,00	93,72
		I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.948.712,00	5.837.970,00	98,14

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	590.792,00	526.830,00	89,17
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.476.980,00	1.462.680,00	99,03
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	488.985,00	484.500,00	99,08
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.425.990,00	1.415.250,00	99,25
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	488.985,00	471.750,00	96,48
			6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.476.980,00	1.476.960,00	100,00
		II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.428.099.630,00	3.183.534.072,00	92,87
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.425.838.442,00	3.181.305.372,00	92,86
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	412.500,00	395.250,00	95,82
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	432.896,00	430.950,00	99,55
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.415.792,00	1.402.500,00	99,06
		III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		182.220.000,00	181.126.000,00	99,40
			1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	182.220.000,00	181.126.000,00	99,40
		IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		390.586.131,00	373.270.121,00	95,57
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.378.104,00	18.258.733,00	99,35
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.035.217,00	18.474.450,00	70,96
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.288.652,00	57.756.887,00	92,72
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.849.730,00	32.767.507,00	99,75



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00	3.400.000,00	88,54
			6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000,00	10.998.000,00	99,98
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.194.428,00	231.614.544,00	98,06
		V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		233.071.076,00	230.200.341,00	98,77
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	118.800.000,00	99,00
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.071.076,00	111.400.341,00	98,52
		VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		254.603.341,00	241.951.803,00	95,03
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.627.341,00	5.595.548,00	99,44
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.976.000,00	69.406.255,00	89,01
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.000.000,00	166.950.000,00	97,63
		VI I.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		144.055.184,00	131.446.253,00	91,25
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.608.273,00	55.191.403,00	85,42
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.228.271,00	28.644.552,00	94,76
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.218.640,00	47.610.298,00	96,73
		VI II.	Penataan Organisasi		240.396,00	0,00	0,00
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	240.396,00	0,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.105.686.806,00	1.025.144.246,00	92,72

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

		I	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	727.730.272,00	665.265.222,00	91,42
			1 Pelaksanaan Konsultasi Publik	8.807.500,00	7.961.088,00	90,39
			2 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	14.143.877,00	12.222.500,00	86,42
			3 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	34.021.450,00	28.263.000,00	83,07
			4 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	18.722.300,00	13.647.922,00	72,90
			5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	652.035.145,00	603.170.712,00	92,51
		II	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	305.138.365,00	293.738.893,00	96,26
			1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	240.057.490,00	236.614.507,00	98,57
			2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	48.497.475,00	42.042.636,00	86,69
			3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	16.583.400,00	15.081.750,00	90,94
		III.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	72.818.169,00	66.140.131,00	90,83
			1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	59.346.429,00	54.833.679,00	92,40
			2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13.471.740,00	11.306.452,00	83,93



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.238.908.156,00	968.382.596,00	78,16
		I	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	469.081.703,00	374.653.551,00	79,87
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	137.238.069,00	121.932.599,00	88,85
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35.898.410,00	26.848.633,00	74,79
		3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	176.112.637,00	143.403.007,00	81,43
		4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	119.832.587,00	82.469.312,00	68,82
		II	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	291.999.660,00	198.648.119,00	68,03
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	152.353.257,00	94.489.319,00	62,02
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.106.250,00	0,00	0,00



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

			3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.020.153,00	35.651.200,00	69,88
			4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.595.000,00	0,00	0,00
			5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	80.925.000,00	68.507.600,00	84,66
		III.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		477.826.793,00	395.080.926,00	82,68
			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.251.284,00	46.063.010,00	84,91
			2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.305.000,00	0,00	0,00
			3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	60.275.000,00	52.985.920,00	87,91
			4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.634.414,00	48.499.026,00	84,15
			5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.462.500,00	2.893.600,00	23,22



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

			6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	289.898.595,00	244.639.370,00	84,39
Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			249.063.535,00	245.669.646,00	98,64
		I		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	62.657.695,00	60.431.436,00	96,45
			1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.657.695,00	60.431.436,00	96,45
		II		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	186.405.840,00	185.238.210,00	99,37
			1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	186.405.840,00	185.238.210,00	99,37
	Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			290.637.686,00	271.222.908,00	93,32
		III.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	290.637.686,00	271.222.908,00	93,32
			1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	238.978.179,00	223.337.888,00	93,46
			2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	51.659.507,00	47.885.020,00	92,69



Tabel 3.8
Penyerapan anggaran per sasaran strategis sesuai APBD 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran					
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	79	80,5	101,90	6.983.419.432,00	6.340.893.402,00	98,64			
	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	70	70	100,00						
Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	81	84,62	104,47						
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	81	84,62	104,47						
Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	12,5	8,33	66,67				249.063.535,00	245.669.646,00	98,64
	Indeks Inovasi Daerah	70*	66,35*	94,79				290.637.686,00	271.222.908,00	93,32

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” dan “Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas”, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,64%.. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2022 pada masing-masing sasaran belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

Pengukuran kinerja yang menerapkan reward dan punishment diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran terbesar digunakan untuk melaksanakan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan anggaran yang disediakan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	KET
-1	-2		-4	-5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	80,5	98,64	18,14
	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	70	98,64	28,64
Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	84,62	98,64	14,02
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	84,62	98,64	14,02
Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	8,33	98,64	90,30
	Indeks Inovasi Daerah	66,35*	93,32	26,97

Berdasarkan tabel 3.8 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil meskipun pada masing-masing sasaran telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
A	Perencanaan Kinerja					
1	Merevisi penulisan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran antara dokumen RENSTRA, RENJA, IKU, Cascading, Pengukuran Kinerja, Perjanjian Kinerja sehingga lebih konsisten	Mereview dokumen perencanaan dan dokumen SAKIP untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil dan indikator kinerja relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja dan penulisan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran konsisten antar dokumen perencanaan	Januari - Maret 2023	3 bulan	Bappeda Litbang	
	Memastikan kembali pohon kinerja yang telah disusun tertuang dalam dokumen perencanaan utamanya dalam dokumen RENSTRA	Mereview RENSTA Bappeda Litbang dan memastikan pohon kinerja seluruh telah tertuang dalam tujuan/sasaran Renstra Bappeda Litbang, dimana Pohon Kinerja ini telah disusun berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan memastikan pola hubungan antar leveling kinerja harus saling mempengaruhi/critical success factor (CSF) dalam pencapaiannya;	Januari - Maret 2024	3 bulan	Bappeda Litbang	
2	Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan kembali dengan mempertimbangkan <i>reward and punishment</i>	Menyusun perencanaan kinerja dengan mempertimbangkan <i>reward and punishment</i> sesuai ketentuan yang berlaku	Januari - Desember 2023	12 bulan	Bappeda Litbang	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

B.	Pengukuran Kinerja					
II	Kualitas Pengukuran					
	a. Pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi kinerja yang berkelanjutan dan dapat diukur secara maksimal	Melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Sampang	Januari - Desember 2023	12 bulan	Bappeda Litbang	
III	Implementasi Pengukuran					
	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam membuat kebijakan, anggaran penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan penyusunan tunjangan kinerja / penghasilan	Januari - Desember 2023		Bappeda Litbang	
C.	Pelaporan Kinerja					
II	Penyajian Informasi Kinerja					
4,	Laporan kinerja kurang lengkap dalam menyajikan informasi analisis efisiensi namun perlu disempurnakan dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dalam dokumen	Menyempurnakan LKJIP Bappeda Litbang Tahun 2022 dengan menyajikan sumber daya secara lengkap	Januari - Februari 2023	1 bulan	Bappeda Litbang	
D.	Evaluasi Internal					
III	Pemanfaatan Evaluasi					
5,	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus disajikan dalam bentuk dokumen yang memadai dan menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya	Menyajikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam bentuk dokumen dan menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya	Januari - Desember 2023	12 bulan	Bappeda Litbang	



Inovasi Bappelitbangda Kabupaten Sampang diantaranya :

1. SIG4TA

Pemerintah Daerah : Kabupaten Sampang

Organisasi Perangkat Daerah : Bappelitbangda Kabupaten Sampang

**Nama Inovasi : SIG4TA (Sistem Integrasi Geospasial untuk
Sampang Satu Data)**

Bentuk Inovasi : Aplikasi Data dan Informasi Geospasial

Inovasi Dimulai : Juni 2022

Latar Belakang:

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data spasial dan data non-spasial serta informasi lainnya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan.

Sebelum era teknologi informasi, pengolahan data geospasial masih secara manual dalam peta kertas. Pencatatan ini menimbulkan kesulitan ketika dilakukan pencarian data. Selain itu data yang tersimpan dalam dokumen rentan terhadap kondisi usia kertas. Sejalan dengan mulai diperkenalkannya komputer untuk mendukung kegiatan operasional, banyak pengolahan data spasial mulai beralih dari sistem manual ke sistem yang berbasis komputer atau yang dikenal dengan sistem informasi geografis. Hal dimaksud dilakukan untuk mempermudah pengolahan serta penyajian informasi berbasis data spasial.

Pengolahan data geospasial selanjutnya mengalami perkembangan seiring dengan munculnya pendekatan geoportal. Geoportal dibuat untuk mempermudah aktivitas manajemen data spasial dimana sekumpulan data spasial tersebut saling terhubung, dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna dan dibentuk untuk dapat menghasilkan informasi geospasial yang mudah diakses baik oleh instansi maupun masyarakat melalui internet (website). Oleh karena itu integrasi geospasial dalam satu geoportal menjadi hal yang sangat strategis dalam akurasi informasi pembangunan daerah. Integrasi geospasial sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah serta mendukung One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) dan perwujudan Satu Data Indonesia.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura, dengan luas wilayah mencapai 1.233,33 km² dibagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/kelurahan dengan berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 59 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Tugas Pembantuan.

Penyediaan data dan informasi geospasial di Kabupaten Sampang saat ini masih terbatas pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagian besar belum dibangun dengan standart dan referensi yang sama (belum valid) dan tidak aktual (tidak sesuai dengan kondisi saat ini). Kendala lain adalah belum sinkronnya data yang ada pada berbagai institusi, sehingga data-data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan sulit untuk diakses serta tidak terintegrasi. Keadaan di atas akan berpengaruh pada proses perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena terkadang ditemukan tumpang tindih program sehingga menyebabkan pengambilan kebijakan yang ditempuh tidak optimal. Untuk mewujudkan akurasi informasi pembangunan daerah, maka diperlukan penyelenggaraan informasi geospasial daerah yang dibangun dalam satu sistem yang memungkinkan mengintegrasikan data dalam satu basis data dan satu sistem referensi, memiliki standart data sesuai dengan kebijakan Satu Peta, memiliki metadata, serta memiliki kemampuan untuk berbagi pakai data/atau dipertukarkan antar sistem yang saling berinteraksi serta dapat diakses secara mudah dalam satu geoportal, mudah diakses dan dibagipakai. Penyelenggaraan informasi geospasial daerah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terlatih dan handal.

Tujuan dan Manfaat :

Tujuan:

1. Tujuan Jangka Pendek yang akan dicapai adalah:
 - 1) Penetapan komitmen bersama antar OPD untuk membangun data dan informasi berbasis spasial yang valid dan aktual;
 - 2) Penetapan regulasi terkait dengan pelaksanaan integrasi geospasial berupa Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati;



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- 3) Penyediaan online platform yang memungkinkan untuk pengintegrasian informasi geospasial, memiliki kemampuan untuk berbagipakai dan dapat diakses secara mudah;
 - 4) Penyiapan Sumberdaya Manusia SDM/Simpul Jaringan untuk pengelolaan data dan informasi geospasial;
 - 5) Pengimplementasian integrasi geospasial dan pengembangan metadata pada 3 (tiga) OPD.
2. Tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai adalah:
- 1) Peningkatan produksi data spasial pada 10 (sepuluh) OPD;
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan data dan informasi geospasial;
 - 3) Peningkatan infrastruktur pendukung teknologi pusat data geospasial.
3. Tujuan Jangka Panjang yang akan dicapai adalah:
- 1) Pengembangan produksi data spasial pada seluruh OPD dan penambahan metadata;
 - 2) Pengembangan sistem data spasial yang terintegrasi secara luas pada beberapa sektor dengan platform geoportal;
 - 3) Pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah.

Manfaat:

1. Manfaat Internal

- 1) Meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan dengan penyediaan data berbasis spasial;
- 2) Meningkatkan capaian kinerja Bappelitbangda;
- 3) Meningkatkan kapasitas Sumber daya Perencana di daerah;
- 4) Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang.

2. Manfaat External

- 1) Meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dengan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- 2) Memberikan informasi yang real time kepada pembuat kebijakan;
- 3) Mendorong terwujudnya kebijakan satu data geospasial (One Map Policy) sebagai alat pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah oleh masyarakat;
- 4) Mendorong kepastian usaha dan kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui penyediaan data dan informasi yang aktual;
- 5) Mendorong keterbukaan informasi publik melalui manajemen data spasial yang mudah diakses oleh siapapun serta memiliki kemampuan dalam berbagi data.



Hasil Inovasi:

Hasil dengan adanya aplikasi SIG4TA ini yaitu: **Pertama**, Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) dibangun dengan standar dan referensi yang sama serta aktual. **Kedua**, Penyediaan data dan informasi geospasial memiliki banyak metadata. **Ketiga**, data terintegrasi dalam satu sistem geoportal sehingga mudah diakses dan dibagikan. Dan yang **Keempat**, terdapat simpul jaringan pada setiap OPD yang terlatih. Kemudian, untuk memberikan payung hukum dalam pelaksanaan inovasi ini serta kelanjutannya maka kondisi yang diharapkan yang **Kelima** yaitu disusun regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah.

Isian Indikator

NO	Indikator Inovasi	Keterangan	Informasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	SK OPD
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini. jumlahnya ada berapa orang.	1-50 SDM
3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi
4	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik
5	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	Pemerintah daerah Sudah melakukan Bimtek inovasi daerah
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam Resntra
7	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah. misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melibatkan pelayanan publik	Inovasi hanya berjalan di OPD tertentu
8	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	Belum pernah direplikasi
9	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	Sudah ada pedoman dan panduan teknis pengembangan inovasi daerah dan dapat



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

			diakses secara daring
10	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	Ditetapkan dengan SK OPD
11	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	ada ketersediaan informasi secara elektronik
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	Pengaduan pengguna semua direspon dengan baik
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak-pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	Belum ada pelibatan masyarakat & stakeholders dalam pengembangan inovasi daerah
14	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	Layanan Telp
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	Sederhana
16	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Inovasi daerah dilakukan secara elektronik
17	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. yang dimaksud sangat lambat (waktunya pengerjaannya kurang dari 6 bulan) yang dimaksud cukup cepat (waktunya pengerjaannya kurang dari 12 bulan) yang dimaksud lambat (waktunya pengerjaannya lebih dari 12 bulan)	Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup cepat
18	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	Ada manfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	hasil pengukuran kepuasan pengguna belum tersedia
20	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (pengguna dapat Pegawai ASN atau Masyarakat) dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah dan/atau pelaksanaan inovasi dimaksud.	Sosialisasi dilakukan di tingkat Kabupaten dan Desa dan disebarluaskan melalui media massa (surat kabar)



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

21	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi Daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah (file MP4, Mov atau Avi)	Durasi video 5 menit dan apabila melebihi dapat dibagi menjadi 2 part. Memuat substansi berupa latar belakang, metode pemecahan masalah, ideation, strategi pemecahan masalah (solusi inovatif),
----	-------------------------	---	---

2. LITBANG BERBAGI

Pemerintah Daerah : Kabupaten Sampang

Organisasi Perangkat Daerah : Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Nama Inovasi : LITBANG BERBAGI

Bentuk Inovasi : Tata Kelola Pemerintahan

Inovasi Dimulai : Tahun 2018 s/d sekarang

Latar Belakang:

Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan sering terjadi, antara lain adalah :

- Belum adanya standar, kriteria dan prosedur yang baku pada pelaksanaan kelitbangan.
- Belum adanya petunjuk operasional yang baku bagi para pelaku kelitbangan.
- Belum sinkronnya perencanaan kegiatan dan anggaran kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan kelitbangan tersebut, diperlukan adanya suatu petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sederhana dan mudah dipahami.

Tujuan dan Manfaat :

Tujuan:

Bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintahan Daerah. Terdapat 4 (empat) tujuan Inovasi Research and Development Center (RDC) PPU yaitu:

RDC sebagai Pusat Data Kajian

RDC sebagai pusat Analisa Kebijakan

RDC sebagai Pusat Cipta Opini

RDC sebagai Pusat Penelitian Partisipatif Universitas (non budget)

Manfaat:

Manfaat yang diperoleh dengan adanya pusat kajian kelitbang daerah atau Litbang Berinovasi ini dimaksudkan agar dalam pengambilan kebijakan daerah bertumpu kepada hal – hal yang bersifat fakta dan analisa. Kajian tidak sebatas potensi sumber daya alam tetapi juga mengenai sumber daya manusia serta kajian sosekbud. Selain itu Litbang akan memberi kemudahan akses bagi lembaga manapun untuk melakukan riset di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga akan memperkaya data riset/kajian daerah.

Hasil Inovasi: SABERNOVA

Isian Indikator :

NO.	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI	DATA PENDUKUNG
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	SK OPD	Dokumen SK/Peraturan
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini. jumlahnya ada berapa orang.	1-50 SDM	SK Kegiatan
3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Dokumen Anggaran
4	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik	Foto Kegiatan/gambar



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

5	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	Pemerintah daerah Sudah melakukan Bimtek inovasi daerah	Foto Kegiatan/Screenshot
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam Renstra	Dokumen Renstra
7	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah. misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melibatkan pelayanan publik	Inovasi hanya berjalan di OPD tertentu	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan
8	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	Belum pernah direplikasi, pernah direplikasi 1kali dst	Dokumen Kerjasama
9	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	Sudah ada pedoman dan panduan teknis pengembangan inovasi daerah dan dapat diakses secara daring	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
10	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	Ditetapkan dengan SK OPD	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
11	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	ada ketersediaan informasi secara elektronik	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	Pengaduan pengguna semua direspon dengan baik dg adanya Call Center / Medsos/ Aplikasi Pengaduan	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	Sudah ada pelibatan Masyarakat/ Masyarakat dan Akademisi/Masyarakat, Akademisi dan Media	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

14	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	Layanan Telp/ Email/Aplikasi Online	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	Dapat dilakukan dalam waktu 8 hari keatas,/3-7 hari/1-2 hari	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
16	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Inovasi daerah dilakukan secara elektronik ukungan melalui web/Sosmed/ Perangkat / Web dan Aplikasi Mode Android/IOS	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
17	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. yang dimaksud sangat lambat (waktunya pengerjaanya kurang dari 6 bulan)	Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup cepat	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
		yang dimaksud cukup cepat (waktunya pengerjaanya kurang dari 12 bulan)		
		yang dimaksud lambat (waktunya pengerjaanya lebih dari 12 bulan)		
18	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	Ada manfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	hasil pengukuran kepuasan pengguna belum tersedia	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

20	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (pengguna dapat Pegawai ASN atau Masyarakat) dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah dan/atau pelaksanaan inovasi dimaksud.	Sosialisasi dilakukan di tingkat Kabupaten dan Desa dan disebarluaskan melalui media massa (surat kabar)	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
21	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi Daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah (file MP4, Mov atau Avi)	Durasi video 5 menit dan apabila melebihi dapat dibagi menjadi 2 part.	
			Memuat substansi berupa latar belakang, metode pemecahan masalah, ideation, strategi pemecahan masalah (solusi inovatif),	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

BAB IV

PENUTUP


Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Bappelitbangda Kabupaten Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Bappelitbangda selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2022.

Hasil kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang selama tahun 2022 tertuang dalam lampiran pengukuran kinerja. Dalam form tersebut dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan form tersebut rata-rata hasil kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang sangat tinggi, karena capaian kerjanya mencapai 96,74%.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan teknis yang dihadapi. Akan tetapi, Bappelitbangda Kabupaten Sampang sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2022, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Bappelitbangda dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2022. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang

Sampang, Januari 2023
Kepala Bappelitbangda Kab. Sampang



I. UMI HANIK LAILA, MM
Pemhina Utama Muda
NIP. 19661202 199303 2 004

KERTAS KERJA EVALUASI RENJA 2021
Bappelitbangda Kab. Sampang

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	NILAI	BOBOT	Kategori
1	Program dalam Renja konsisten dan selaras dengan RENSTRA dan RPJMD	100	10%	Sangat Baik
2	Kegiatan dalam Renja konsisten dan selaras dengan RENSTRA		10%	Belum Diisi
3	Indikator kinerja program (output) telah memenuhi kriteria SMART		20%	Belum Diisi
4	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	Y/T	15%	Belum Diisi
5	Anggaran kegiatan dalam dokumen Renja sudah dirasionalkan dengan output yang akan dicapai		15%	Belum Diisi
6	Indikator kinerja kegiatan (output) telah memenuhi kriteria SMART		20%	Belum Diisi
7	Indikator kinerja Program dan Kegiatan dalam dokumen Renja konsisten dengan dokumen Renstra		10%	Belum Diisi
NILAI KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN OPD				Belum Diisi

Keterangan:

Klasifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

No	Klasifikasi	Nilai
1	Sangat Baik	$91 \leq 100$
2	Baik	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Kurang	$51 \leq 65$
5	Sangat Kurang	≤ 50

No.	Program/Kegiatan (dalam Renja)	Selaras				Konsisten		
		RPJMD		RENSTRA		RPJMD		
1	2	3		4		5		
1		Y	1	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
2		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
3		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
4		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
5		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
6		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
7		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T

8		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
9		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
10		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
11		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
12		Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
Nilai kinerja		100						
1	diisi nama kegiatan OPD			Y/T	Belum Diisi			Y/T

2			Y/T	Belum Diisi		Y/T
3			Y/T	Belum Diisi		Y/T
4			Y/T	Belum Diisi		Y/T
5			Y/T	Belum Diisi		Y/T
6						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
7			Y/T	Belum Diisi		Y/T
8			Y/T	Belum Diisi		Y/T
9			Y/T	Belum Diisi		Y/T
10						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
11			Y/T	Belum Diisi		Y/T
12			Y/T	Belum Diisi		Y/T
13			Y/T	Belum Diisi		Y/T
14						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
15			Y/T	Belum Diisi		Y/T
16			Y/T	Belum Diisi		Y/T
17			Y/T	Belum Diisi		Y/T
18			Y/T	Belum Diisi		Y/T

19			Y/T	Belum Diisi		Y/T
20			Y/T	Belum Diisi		Y/T
21			Y/T	Belum Diisi		Y/T
22			Y/T	Belum Diisi		Y/T

23			Y/T	Belum Diisi		Y/T
24			Y/T	Belum Diisi		Y/T
25			Y/T	Belum Diisi		Y/T
26			Y/T	Belum Diisi		Y/T

27			Y/T	Belum Diisi		Y/T
28			Y/T	Belum Diisi		Y/T
29			Y/T	Belum Diisi		Y/T
30			Y/T	Belum Diisi		Y/T
31						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
32			Y/T	Belum Diisi		Y/T
33			Y/T	Belum Diisi		Y/T
34			Y/T	Belum Diisi		Y/T
35						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
36			Y/T	Belum Diisi		Y/T
37			Y/T	Belum Diisi		Y/T
38			Y/T	Belum Diisi		Y/T
39						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
40			Y/T	Belum Diisi		Y/T
41			Y/T	Belum Diisi		Y/T
42			Y/T	Belum Diisi		Y/T
43			Y/T	Belum Diisi		Y/T

44			Y/T	Belum Diisi		Y/T
45			Y/T	Belum Diisi		Y/T
46			Y/T	Belum Diisi		Y/T
47			Y/T	Belum Diisi		Y/T

48			Y/T	Belum Diisi		Y/T
49			Y/T	Belum Diisi		Y/T
50			Y/T	Belum Diisi		Y/T
51			Y/T	Belum Diisi		Y/T

52			Y/T	Belum Diisi		Y/T
53			Y/T	Belum Diisi		Y/T
54			Y/T	Belum Diisi		Y/T
55			Y/T	Belum Diisi		Y/T
56						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
57			Y/T	Belum Diisi		Y/T
58			Y/T	Belum Diisi		Y/T
59			Y/T	Belum Diisi		Y/T
60						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
61			Y/T	Belum Diisi		Y/T
62			Y/T	Belum Diisi		Y/T
63			Y/T	Belum Diisi		Y/T
64						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
65			Y/T	Belum Diisi		Y/T
66			Y/T	Belum Diisi		Y/T
67			Y/T	Belum Diisi		Y/T
68			Y/T	Belum Diisi		Y/T

69			Y/T	Belum Diisi		Y/T
70			Y/T	Belum Diisi		Y/T
71			Y/T	Belum Diisi		Y/T
72			Y/T	Belum Diisi		Y/T

73			Y/T	Belum Diisi		Y/T
74			Y/T	Belum Diisi		Y/T
75			Y/T	Belum Diisi		Y/T
76			Y/T	Belum Diisi		Y/T

77			Y/T	Belum Diisi		Y/T
78			Y/T	Belum Diisi		Y/T
79			Y/T	Belum Diisi		Y/T
80			Y/T	Belum Diisi		Y/T
81						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
82			Y/T	Belum Diisi		Y/T
83			Y/T	Belum Diisi		Y/T
84			Y/T	Belum Diisi		Y/T
85						

			Y/T	Belum Diisi		Y/T
86			Y/T	Belum Diisi		Y/T
87			Y/T	Belum Diisi		Y/T
88			Y/T	Belum Diisi		Y/T
89						

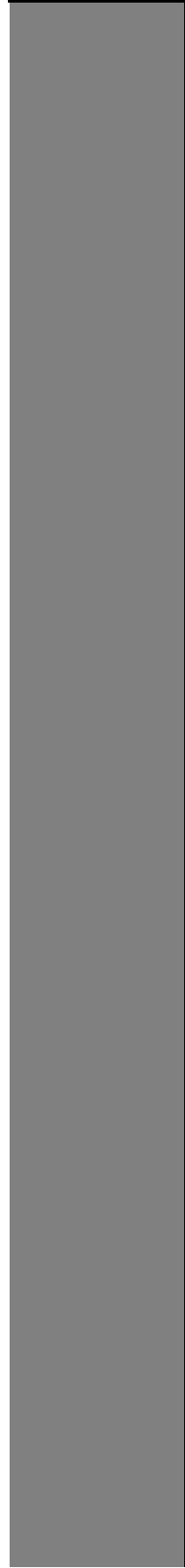
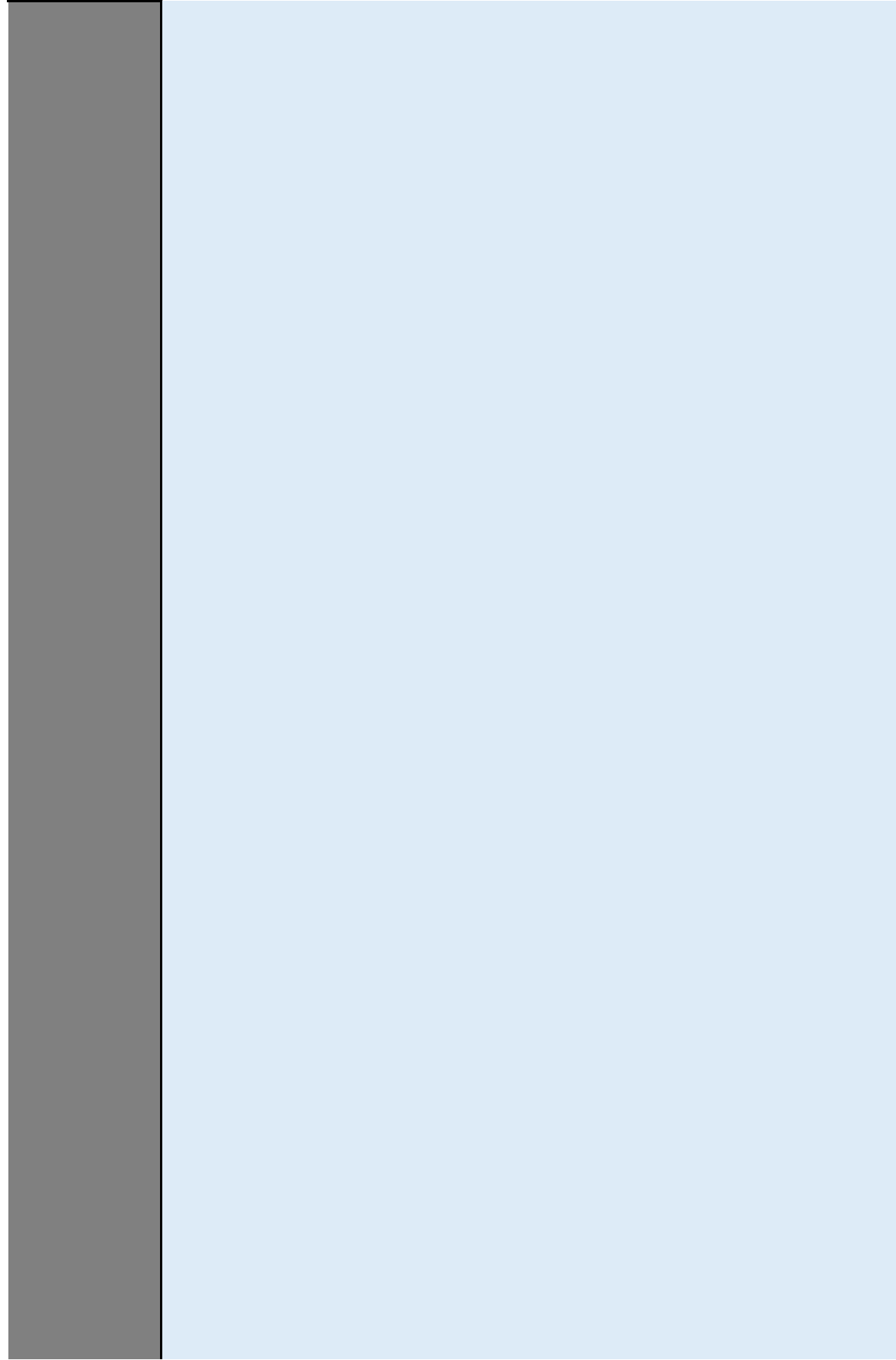
			Y/T	Belum Diisi		Y/T
90			Y/T	Belum Diisi		Y/T
91			Y/T	Belum Diisi		Y/T
92			Y/T	Belum Diisi		Y/T
93			Y/T	Belum Diisi		Y/T

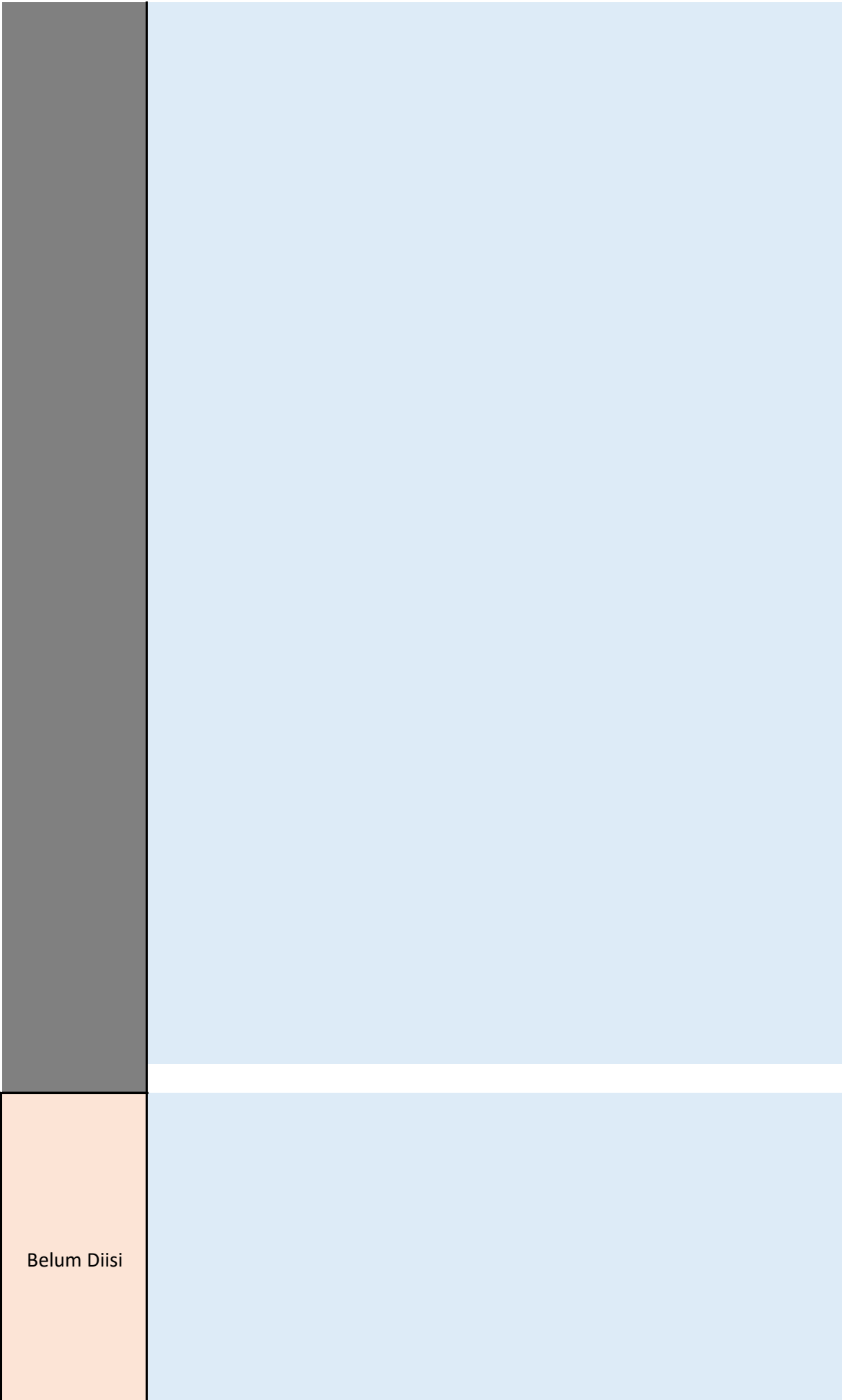
94			Y/T	Belum Diisi		Y/T
95			Y/T	Belum Diisi		Y/T
96			Y/T	Belum Diisi		Y/T
97			Y/T	Belum Diisi		Y/T

98			Y/T	Belum Diisi		Y/T
99			Y/T	Belum Diisi		Y/T
100			Y/T	Belum Diisi		Y/T
101			Y/T	Belum Diisi		Y/T

102			Y/T	Belum Diisi		Y/T
Nilai kinerja						

			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
Belum Diisi			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T
			Y/T	Belum Diisi	Y/T	Belum Diisi	Y/T





Belum Diisi

Belum Diisi	
Belum Diisi	
Belum Diisi	
Belum Diisi	

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi
Belum Diisi

